



David: Anggaran Jamkesda Tak Cukup

► Jelaskan Alasan Tak Perpanjang Kerja Sama

RATAHAN, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, melakukan pembahasan bersama terkait tidak lagi diperpanjangnya kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Setelah dilakukan pembahasan dan mendengarkan penjelasan dari sekda bersama dinas terkait. Masalah kenaikan bpjs ini ternyata sangat kompleks. Pemkab sendiri seperti sedang makan buah simalakama," kata Ketua DPRD Mitra Marty Ole.

Lebih lanjut ia mengatakan, Dana Uhc dari pemkab untuk jamkesda, itu kebijakan bukan kewajiban. "Akan tetapi kami DPRD akan mendukung yang nantinya menjadi keputusan pemkab," tuturnya.

Plh Sekda Mitra David Lalandos mengatakan bahwa akan dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bupati JS.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan DPRD akan kebijakan Pemkab Mitra dan seluruh hasil pembahasan ini, termasuk usulan beberapa anggota dewan untuk dipertimbangkan kembali kerjasama dengan BPJS, itu semua akan kami sampaikan ke Bapak Bupati James Sumendap," tukas

Anggaran jaminan kesehatan daerah yang disipkan Pemkab tidak mencukupi. Karena pada saat APBD disahkan, hitungan iurannya sebelum kenaikan.

DAVID LALANDOS
Plh Sekda Mitra

David Lalandos.

Ia mengatakan, pihak pemkab menyampaikan alasan tak diperpanjangnya lagi kerja sama tersebut, akibat adanya Perpres 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, yang salah satu pada aturan tersebut berkaitan dengan kenaikan iuran.

"Anggaran jaminan kesehatan daerah yang disipkan Pemkab tidak mencukupi. Karena pada saat APBD disahkan, hitungan iurannya sebelum kenaikan," katanya.

Menurut David, jika harus membayar iuran setelah kenaikan maka dana yang harus disiapkan Pemkab jumlah Rp 22 miliar.

sedangkan anggaran di APBD hanya Rp 16 miliar untuk mencover sekira 51.000 orang kepesertaan. "Meski dari kebijakan Pemkab berupaya agar seluruh masyarakat di Minahasa Tenggara, tapi anggaran harus diakui tidak mencukupi," jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkan David, saat ini Pemkab mempunyai skema agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dari pemerintah dengan anggaran Rp 16 miliar.

"Kami mempunyai skema untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Selain itu akan meningkatkan pelayanan serta sarana prasarana di 13 puskesmas yang sudah terakreditasi, dimana 8 di antaranya telah memiliki fasilitas rawat inap," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Pemkab juga akan memaksimalkan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat yang mulai melakukan pelayanan.

Sementara itu langkah strategis jangka pendek dari Pemkab, yakni mensosialisasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan Puskesmas di setiap kecamatan, serta memaksimalkan setiap dokter yang ada di Minahasa Tenggara. (ano)